# TORANG S AMUA BASUDARA

(Studi Kasus Pasca Konflik Di Manado)

Oleh: Arifuddin Ismail

#### Abstrak

Konflik sosial bernuansa SARA di berbagai daerah telah 'berhasil' ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Namun telah meninggalkan berbagai masalah dalam hubungan antar umat beragama setempat. Setidaknya, telah terjadi hubungan yang sangat hati-hati atau bahkan kurang harmonis yang selanjutnya mempengaruhi aktivitas keagamaan dan interaksi sosial umat beragama. Inilah yang kemudian mendasari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya sudah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah dan para pemuka agama telah sepakat dan berkomitmen untuk memelihara kedamaian dalam suatu kehidupan yang rukun di kalangan umat beragama. Komitmen tersebut dimanifestasikan dalam bentuk: 1) Umat beragama secara leluasa melakukan aktivitas keagamaan, baik dalam kaitannya dengan peribadatan, sosisalisasi ajaran agama (pendidikan) maupun pendirian rumah ibadah. 2) Dalam kehidupan sosial secara umum memang tanpa terjalin interaksi sosial yang mesra dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kedamaian dengan mengedepankan simbol "Torang Samua Basudara". 3) Walaupun tampak terkesan, bahwa intervensi pemerintah (top down) terlalu tinggi untuk pemeliharaan kerukunan, namun hasilnya tidak mengecewakan, 4) Intervensi pemerinfah dalam upaya penciptaan kerukunan mendapat respons positif dari masyarakat. Keterlibatan mereka dalam program-program BKSAUA, BKWAUA dari provinsi hingga ke kecamatan-kecamatan merupakan gambaran wujud peran serta masyarakat.

#### I. PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang dan Masalah

Berbagai peristiwa konflik yang menggejolak di sebagian wilayah Indonesia pada penghujung dan pasca era orde baru mengindikasikan bahwa telah terjadi pertentangan menyangkut berbagai kepentingan di berbagai kelompok dalam masyarakat. Pertentangan itu, issu agama, ras, dan antar golongan (SARA) demikian cepatmenyebarkesegalapenjurusehinggatercipta suasana ketegangan dan konflik dalam kehidupan masyarakat. Rupanya berbagai perbedaan dalam masyarakat majemuk, di samping dapat berfungsi selaku faktor perekat, juga dapat menjadi faktor perusak integrasi masyarakat.

Ketika terjadi konflik dalam masyarakat, agama seringkali dibawa serta sebagai faktor legitimasi penyebab konflik dengan maksud antara lain untuk menggalang solidaritas yang lebih besar dan luas dari sesama umat. Dalam suasana konflik, agama memang seringkali menjadi titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam interaksi sosial masyarakat plural.

Penelitian yang dilakukan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan terhadap konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah, telah berhasil merekonstruksi berbagai aspek dari konflik sosial yang diamati meliputi: kronologis konflik, faktor-faktor penyebab, akibat yang ditimbulkan, upaya penanganan dan rehabilitasi pasca konflik. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dalam konteks globalisasi, maka diasumsikan bahwa suasana kehidupan beragama masyarakat pasca konflik di daerah-daerah akan mengalami pula perubahan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan atau dilanjutkan penelitian untuk memperoleh informasi tentang dinamika kehidupan beragama masyarakat pasca konflik di daerah-daerah serta hubungannya dengan interaksi sosial. Informasi yang diperoleh, diharapkan berguna sebagai masukan kebijakan pemerintah berkaitan dengan program peningkatan kerukunan umat beragama yang dinamis dan berwawasan kultural, baik intern maupun antar umat beragama.

Konflik sosial bernuansa agama yang terjadi di berbagai daerah beberapa tahun yang lalu telah berhasil ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, Namun telah meninggalkan berbagai masalah dalam hubungan antar umat beragama setempat. Setidaknya, telah terjadi hubungan yang sangat hati-hati atau bahkan kurang harmonis yang selanjutnya mempengaruhi aktivitas keagamaan dan interaksi sosial umat beragama. Gambaran umum permasalahan di atas, dapat dijabarkan berbagai masalah khusus yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: pertama,

Bagaimana suasana pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat Manado; kedua, Bagaimana kecenderungan pola interaksi sosial antar umat beragama; Ketiga, Seperti apa peran pemerintah, dalam hal ini pejabat berwenang dari Kantor Departemen Agama setempat dan pemerintah daerah setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, demikian pula pejabat instansi pemerintah lainnya yang terkait, dalam upaya penanganan masalah dan pembinaan kerukunan umat beragama di lokasi penelitian; keempat, Seperti apa peran masyarakat (melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh LSM setempat) dalam upaya penanganan masalah dari pembinaan kerukunan umat beragama di lokasi penelitian; kelima, Hal-hal apa yang dipandang sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat upaya penanganan masalah dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di lokasi penelitian.

#### B. Tujuan Penelitian dan Kegunaannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suasana kerukunan umat beragama pasca konflik di daerah Manado, meliputi aktivitas keagamaan, interaksi sosial, peran pemerintah, baik instansi Departemen Agama setempat maupun instansi pemerintah daerah, serta peran masyarakat setempat.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi akurat tentang: Suasana pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat di lokasi penelitian. Kecenderungan pola interaksi sosial antarumat beragama di lokasi penelitian. Wujud peran pemerintah, dalam hal ini pejabat berwenang dari Kantor Departemen Agama setempat dan pemerintah daerah setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, demikian pula pejabat instansi pemerintah lainnya yang terkait dalam penanganan masalah dan pembinaan kerukunan umat beragama di lokasi penelitian. Wujud peran masyarakat (melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh LSM setempat) dalam penanganan masalah dan pembinaan kerukunan umat beragama di lokasi penelitian. Faktor pendukung dan penghambat upaya penanganan masalah dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di lokasi penelitian.

Informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah, baik Departemen Agama dan jajarannya maupun Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah sebagai pihak lain yang terkait, termasuk umat beragama. Secara akademik, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan input bagi pengembangan pendekatan studi dinamika sosial, khususnya interaksi sosial dalam kaitan dengan hubungan umat beragama di Indonesia.

#### II. PENJELASAN KONSEP DAN TEORI

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini serta kaitannya dengan teori-teori yang relevan perlu dijelaskan. Ada tiga konsep pokok yang akan dijelaskan, yakni: (1) Kerukunan; (2) Konflik.; dan (3) Kerukunan umat beragama.

#### A. Rukun

Kata rukun dalam bahasa Indonesia berarti: serasi, sesuai, cocok, damai, bersatu. Perkataan kerukunan berarti perihal hidup rukun, serasi, dan seterusnya; dapat pula berarti perasaan rukun atau kesepakatan (Poerwadarminta, 1976:835-836). Dalam sosiologi, konsep kerukunan dapat dipadankan dengan kerjasama (co-operation) atau dapat pula dipadankan dengan akomodasi (accomodation).

Menurut Selo Soemardjan(1974:177) bahwa bentuk-bentuk pokok interaksi sosial dapat merupakan kerjasama (co-operation), tetapi dapat juga berbentuk persaingan (competation), dan bahkan dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Bentuk lain dari interaksi sosial ialah akomodasi (accomodation) yang biasanya dicapai setelah pihak-pihak yang terlibat konflik dapat mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka dan berusaha menciptakan hubungan kerja (working relationship)

Kerukunan sebagai interaksi sosial bersifatdinamis. Suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang semula rukun, bisa menjadi tidak rukun, dan sebaliknya suatu masyarakat kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak rukun dapat kembali menjadi rukun. Perubahan dari rukun menjadi tidak rukun, dan sebaliknya tergantung dari proses interaksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkataan interaksi itu sendiri selalu mengacu kepada adanya hubungan timbal-balik antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki identitas. Jika interaksi antara penganut agama yang berbeda tidak menonjolkan identitas agama masing-masing, hal yang memang tidak mungkin dikompromikan maka akan terjadi kerukunan. Tetapi sebaliknya, jika dalam interaksi sosial, masing-masing penganut agama menonjolkan atau mengaktifkan simbol-simbol (identitas) agama masing-masing maka akan terjadi ketidakrukunan.

Konsep kerukunan dapat pula dikaitkan dengan konsep integrasi. Pembahasan mengenai integrasi, dalam Sosiologi, sering dirujukkan dengan salah satu teori yang dipandang relevan yakni Teori Fungsional. Penganut teori ini berpandangan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang stabil yang terdiri atas kelompok-kelompok yang selalu bekerjasama. Hal ini terjadi karena adanya konsensus atas kesamaan nilai yang dianut dan dikembangkan untuk

mempersatukan masyarakat. Karena itu, ketertiban sosial merupakan hasil usaha tidak sadardari orang-orang untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka secara produktif.

# B. Konflik

Konflik, secara harfiah berarti, percekcokan, perselisihan, pertentangan. Konflik dapat disamakan artinya dengan ketidakrukunan, jadi lawan dari kerukunan. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya ketegangan antara satu pihak dengan pihak lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya ialah persaingan dan kerjasama.

Dalam interaksi sosial, konflik tidak selamanya berkonotasi negatif, tetapi boleh jadi berkonotasi positif, seperti di antara dua kubu yang berkonflik, masingmasing akan menyusun strategi untuk membangun kekuatan kelompoknya (kohesi). Lewis Coser mengomentari beberapa keuntungan konflik, yaitu: 1) dapat membangun dan memperkuat batas kesadaran dan mobilitas kelompok; 2) dapat mengurangi rasa permusuhan yang bersifat penghancuran total dengan memberikannya penyaluran secara sedikit demi sedikit; 3) sebagai tanda adanya hubungan sosial yang rapat atau menjadi indeks stabilitas hubungan yang ada dan pertanda adanya "balancing mechanism"; 4) membangun hubungan sosial dalam bentuk "antagonistic cooperation" dan melahirkan tipe inter relasi baru 5) merangsang inovasi (call for innovations), dan merangsang aliansi-aliansi baru (call for allies). Selanjutnya Coser menekankan, bahwa untuk mendapatkan keuntungan diperlukan syarat, yaitu: konflik harus bersifat praktis dan operasional, bukan pada posisi-posisi ideologis, bersifat instrumental dari pada "expressive in nature", terbatas dan spesifik pada area tertentu, belangsung dalam jangka waktu tertentu, datang secara berurut, tidak bersamaan, bersifat saling menyilang (cross cutting) dan tidak kumulatif, serta tidak mengancam nilai dasar organisasi. Konflik demikian dapat diatasi, diarahkan, dikontrol dan diserap untuk kemudian diambil keuntungannya (Coser dalam Mudzhar, 2003:4).

Pertikaian atau konflik tidak mungkin berlangsung selamanya. Pada suatu saat konflik tersebut akan mendapat penyelesaian. Berakhirnya atau penyelesaian suatu konflik mungkin hanya berlangsung sementara waktu, dalam arti kedua pihak tidak puas sepenuhnya. Suatu keadaan setelah selesainya konflik atau pasca konflik, berupa hubungan kerja (working relationship) disebut akomodasi (accomodation). Akomodasi ini disebut sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial (Mudzhar, 2003:13-25).

Sementara itu penganut Teori Konflik berpandangan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang tidak stabil, terdiri atas kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang bertentangan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Karena itu, ketertiban sosial dihasilkan dan dipertahankan oleh pemaksa yang terorganisasikan oleh kelas-kelas yang dominan (Ali, 2003:82-83).

Kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Banyak hasil penelitian yang menginformasikan bahwa perbedaan agama saja tidak serta-merta mengakibatkan terjadinya konflik antarumat beragama. Agama dalam konflik sering lebih berperan sebagai faktor pengiring yang meningkatkan eskalasi konflik. Identitas keagamaan dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk mencari dukungan, legitimasi, dan memperkuat posisi masing-masing kelompok yang bertikai. Sementara faktor-faktor penyebabnya diduga kuat adalah dari di luar agama (Azra, 1999: 15-16).

Asyumardi Azra (1999:16) menyatakan bahwa faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi merupakan infra struktur terjadinya konflik dan kerusuhan sosial. Sementara etnisitas dan agama dapat dipandang sebagai faktor komplementer yang menambah semakin mengerasnya kelompok maupun aktor yang terlibat konflik, apalagi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Etnisitas dan agama dapat menjadi sumber konflik dan kerusuhan sosial, tetapi kedua faktor tersebut lebih sering membutuhkan infra struktural lain untuk menyulut pecahnya konflik dan kerusuhan sosial daripada sebagai faktor yang berdiri sendiri.

# C. Kerukunan Umat Beragama dan Kebijaksanaan Pemerintah

Istilah "Kerukunan Umat Beragama" secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Musyawarah tersebut diadakan karena saat itu bangsa Indonesia mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan bangsa Indonesia. Dampak positif dari musyawarah ialah semakin terbukanya tokoh/pemuka agama untuk melakukan dialog, konsultasi, seminar cendekiawan agama, dan kunjungan kerja bersama majelis-majelis agama tingkat pusat ke daerah-daerah. Pelembagaan pertama dari kerjasama itu baru berhasil diwujudkan setelah 13 tahun kemudian, berupa terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (disingkat WMAUB) tingkat pusat yang dikukuhkan pada tanggal 30 Juni 1980 melalui SK Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980.

Wadah WMAUB bertujuan untuk membicarakan tanggungjawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang saling berbeda agama. Keputusan yang diambil wadah ini merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran kepada pemerintah dan majelis-majelis agama serta himbauan kepada umat dan masyarakat luas.

Pada masa Menteri Agama Mukti Ali, diperkenalkan prinsip dasar kerukunan yakni "agree in disagreement" yakni setuju dalam perbedaan. Kemudian pada masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dikembangkan pendekatan "trilogi kerukunan" yakni kerukunan intern, antar, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Pada masa Menteri Agama Munawir Sadzali sampai Menteri Agama Malik Fajar, disamping meneruskan kebijakan "trilogi kerukunan", ditempuh kebijakan yang disebut dengan "kerukunan dinamis" yang bertujuan untuk membangun kerjasama sosial yang lebih luas di antara umat beragama. Ketika kebijakan ini mulai berkembang dan mendapat respons positif dari tokoh/pemuka agama — timbul kerusuhan dan pertikaian di berbagai daerah yang sempat menyeret berbagai kalangan umat beragama setempat. Akibat dari kerusuhan itu, timbul hubungan yang sangat hati-hati bahkan kurang harmonis di antara sebagian komunitas umat beragama.

Seiring dengan dinamika kehidupan dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan, maka pada masa Menteri Agama Tolchah Hasan dan Said Agil Husin Al Munawar, fokus yang dikembangkan lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan kebijakan "pengembangan wawasan multikultural" serta dengan pendekatan yang bersifat "bottom up".

Wawasan multikultural dipandang perlu dikembangkan agar masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam hakekat pluralitas bangsa yang sudah sekian lama tumbuh dalam negara kesatuan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mampu mengambil manfaat dari perbedaan-perbedaan maupun kesamaan serta kearifan-kearifan lokal yang ada dalam masyarakat majemuk.

Menindaklanjuti kebijakan "pengembangan wawasan kultural" tersebut maka Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan telah mengimplementasikan beberapa program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, antara lain program "Dialog Pengembangan Wawasan multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah". Tema sentral dari dialog ialah mencari bagaimana cara efektif mengelola kemajemukan dan keragaman secara bersama antara pemuka agama dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Sejak tahun 2002 sampai 2004 kegiatan dialog telah dilaksanakan di 16 provinsi yakni: Sumatera Utara, Sumantera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jami, Riau, Sulawesi Selatan,

Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari rangkaian dialog yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa masih cukup banyak ditemukan kearifan lokal yang dimiliki daerah secara spesifik, baik kearifan yang telah lama menjadi tradisi masyarakat maupun kearifan baru yang disekapati bersama. Hal ini sangat bermanfaat untuk diketahui dan dikaji bersama secara seksama dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan damai di masa depan.

Upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam konteks integrasi masyarakat Indonesia memiliki sejumlah faktor potensial, antara lain: (1) Adanya konsensus nasional mengenai nilai-nilai umum yang bersifat fundamental dan disepakati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (seperti Sumpah Pemuda dan Pancasila, pen.); (2) Adanya adat budaya, tradisi masyarakat dan bangsa yang bersifat arif dan bijaksana dan masih terpelihara pada berbagai komunitas; (3) Adanya kekuasaan pemerintah yang memiliki kekuatan sosial dalam masyarakat.

Telah dikemukakan tiga macam teori yang dipandang relevan untuk menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Ketiga teori dimaksud masing-masing. Teori Interaksi Sosial, Teori Fun^siottalatmStw.kSd3i Fungsional, dan Teori Konflik. Ketiga macam teori, akan dicoba diterapkan dalam penelitian, walaupun tidak seutuhnya, terutama dalam menemukan dan menjelaskan informasi yang dipertanyakan sebagai permasalahan penelitian.

Teori Fungsional atau Struktural Fungsional digunakan untuk menjelaskan fenomena aktivitas keagamaan masyarakat yang antara lain untuk melanggengkan kerukunan intern umat beragama sebagai bagian dari upaya mempertahankan integritas masyarakat. Teori Fungsional melihat agama sebagai salah satu bagian dari struktur sosial yang berfungsi mempertahankan integritas sistem sosial. Selain itu, Teori Fungsional juga dijadikan acuan untuk menggali dan menjelaskan partisipasi aktif masyarakat, baik yang dipertahankan oleh tokoh/pemimpin agama dan tokoh/pemimpin masyarakat dan adat maupun oleh tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya penanganan masalah dan pembinaan kerukunan umat beragama dengan pendekatan "bottom up" (Isra, 2003:4).

Teori Interaksi Sosial digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antar umat beragama dalam melakukan kegiatan interaksi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain dalam bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik. Akan dijelaskan pula kearah mana kecenderungan sifat dan bentuk-

bentuk interaksi yang dilakukan itu, apakah ke arah kerjasama (co-operation), ke arah kompetisi (competition) atau persaingan, ataukah ke arah pertikaian (conflict).

Teori Konflik digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau seperti apa peran yang dimainkan/dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam upaya penanganan masalah dan pembinaan kehidupan umat beragama pasca konflik di berbagai daerah. Teori Konflik melihat bahwa ketertiban sosial dihasilkan dan dipertahankan oleh pemaksa yang terorganisir oleh kelas-kelas yang dominan. Fungsi pemaksa, dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara ada pada pemerintah. Dan pada umumnya dilakukan dengan pendekatan "top j0wn" (Mudzhar, 2004:20).

#### III. METODE YANG DIGUNAKAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan memilih jenis metode deskriptif. Pemakaian metode dan teknik operasional lebih lanjut selalu didasarkan atau mengacu kepada pendekatan dan jenis metode pokok di atas.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan dan partisipasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan kepada para informan dari unsur pejabat instansi Departemen Agama setempat, pejabat pemerintah daerah, tokoh/pemimpin agama, masyarakat, adat dan pihak-pihak lain yang dipandang dapat memberikan data dan informasi akurat yang diperlukan.

Pengamatan dan partisipasi dilakukan terhadap obyek, sarana dan aktivitas terkait seperti aktivitas dan sarana keagamaan, aktivitas dan sarana interaksi sosial antarumat beragama, aktivitas dan sarana sosial-budaya masyarakat setempat yang dianggap mempunyai kaitan dengan pembinaan solidaritas dan kerukunan, aktivitas dan lembaga kerukunan tingkat bawah (kecamatan) yang telah terbentuk, kegiatan dialog dan musyawarah serta temu mu<sup>1113</sup> dan kerjasama sosial kemasyarakatan yang ada.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik yang pernah terjadi, upaya solusi damai, dokumen pernyataan kesepakatan pihak-pihak terkait, dan sebagainya. Penelusuran dokumen dilakukan terhadap dokumen yang ada di kantor instansi pemda setempat dan jajarannya serta kantor/instansi Departemen Agama setempat, dokumen yang dimiliki tokoh/pemimpin agama, masyarakat, dan adat setempat.

Studi kepustakaan dilakukan di berbagai perpustakaan yang tersedia, baik di lokasi maupun di tempat lain, sebelum dan pada saat serta sesudah turun

lapangan. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi kondisi geografis, dan demografis, kehidupan sosial ekonomi, sarana dan pemeluk agama, serta gambaran singkat tentang konflik yang melanda masyarakat (kalau pemah terjadi). Demikian pula tentang aktivitas keagamaan intern dan interaksi sosial antarumat beragama (keduanya dalam konteks pasca konflik dan diamati adatidaknya pengaruh konflik terhadap kedua aktivitas tersebut), peran pemerintah dan masyarakat, serta hal-hal yang dipandang sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya memelihara dan menjamin kelanggengan hubungan harmonis atau kerukunan umat beragama. Pemerintah yang dimaksudkan di sini meliputi unsur instansi Departemen Agama dan pemerintah daerah setempat, serta instansi pemerintah setempat lainnya yang terkait, diwakili oleh pejabat yang berwenang masing-masing. Sedangkan masyarakat dimaksudkan ialah tokoh/pemimpin agama dan tokoh masyarakat termasuk tokoh adat setempat.

Kajian tentang peran pemerintah dan masyarakat, perlu lebih mendalam antara lain dengan mengungkapkan ciri-ciri ketokohan dari masing-masing pejabat atau tokoh yang dipandang sebagai "opinion leader" setempat, tentang kemampuannya, integritas kepribadiannya, wawasan dan gagasannya, kerjasama. serta aktivitas sosialnya yang terkait dengan upaya pembinaan kerukunan hidup umat beragama di daerah masing-masing.

Data dan informasi yang dihimpun, diolah secara kualitatif, dilakukan klasifikasi dan/atau kategorisasi, lalu dianalisis secara kualitatif serta diberi interpretasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian disusun draft laporan awal sebelum didiskusikan dengan anggota tim peneliti dan diseminarkan. Saran dan koreksi yang relevan dalam seminar dijadikan bahan untuk perbaikan dan penyempumaan laporan akhir. Kemudian dibuatkan ringkasan atau executive summary untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua panitia.

# IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Aktivitas Keagamaan

## 1. Pelaksanaan Ibadah

Aktivitas keagamaan umat beragama berjalan sebagaimana mestinya. Secara bebas dan leluasa setiap umat beragama melakukan aktivitas keagamaannya dengan tenang, tanpa merasa risi dan tertekan. Biasanya pelaksanaan kegiatan keagamaan dari masing-masing umat beragama, baik

umat Kristiani, Umat Islam maupun Hindu dan Budha selalu dilakukan di rumahrumah ibadah (Gereja, Masjid, Pura dan Klenteng), dan sewaktu-waktu dilakukan di rumah-rumah atau kantor berdasarkan permintaan atau jenis kegiatan. Semua umat beragama menjadikan rumah ibadah mereka sebagai sentral kegiatan keagamaan, karena setiap rumah ibadah, selain difungsikan untuk kegiatan rutin peribadatan juga difungsikan sebagai tempat pendidikan keagamaan dan kegiatan lain.

#### 2. Pendirian Rumah Ibadah

Berdirinya rumah ibadah dari masing-masing umat beragama di Manado menunjukkan adanya kebebasan hidup beragama. Antara agama yang satu dengan agama yang lain tidak saling menghalangi utnuk mendirikan rumah ibadah, sepanjang tanah yang digunakan untuk pendirian rumah ibadah tidak dalam kasus. Malah mereka saling mendukung dan saling memberi kesempatan.

Dari 279 rumah ibadah yang selama ini sudah berdiri, tidak satu di antaranya yang terdengar pemah berkasus. Artinya, tidak pernah ada pelarangan dari umat beragama tertentu kepada yang lainnya. Mereka tidak saling menghalangi, bahkan sebaliknya mereka merelakan tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah ibadah. Pada prinsipnya mereka menyetujui setiap pembangunan rumah ibadah asalkan pemilik tanah atau lokasi merelakannya, baik dalam bentuk hadiah, hibah maupun dalam bentuk jual beli. Memang beberapa kasus terjadi, pembangunan masjid dibatalkan, karena tanah untuk rencana pembangunan masjid tersebut bersengketa di antara pemiliknya. Kasus lain dari batalnya atau tidak jadinya masid dibangun, karena persoalan tidak ada kecocokan harga tanah antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Demikian halnya dari pihak pemerintah juga tidak membatasi pendirian rumah ibadah. Malah pihak pemerintah mendukung pembangunan rumah ibadah untuk melengkapi sarana peribadatan dari masing-masing umat beragama dalam rangka pelayanan terhadap umat. Hanya memang selalu menganjurkan kepada umat beragama untuk tetap memperhatikan ketentuan persyaratan pembangunan rumah ibadah guna menghindari munculnya konflik umat beragama.

# 3. Sosialisasi Agama

Salah satu bentuk transformasi keilmuan yang dilakukan oleh umat beragama Manado selain kegiatan di rumah ibadah adalah dengan menggalakkan pendidikan informal, seperti bagi penganut muslim dilakukan dalam bentuk pengajian (pendidikan non formal) baik secara khusus (takhassus) maupun secara terbuka. Umat Islam di Manado menganggap bahwa untuk

mensosialisasikan ajaran agama di tengah masyarakat, tidak cukup hanya melalui pembelajaran di sekolah/perguruan tinggi, karena tidak semua warga masyarakat bisa menikmatinya. Salah satu upaya yang dilakukan melalui majlis taklim dari rumah ke rumah, maupun pengajian terbuka di masjid-masjid.

Bagi umat Nasrani, sekolah minggu adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah (tingkat TK, SD, dan SLTP) untuk mensosialisasikan ajaran agama Nasrani. Sekolah tersebut dibawah koordinasi Gereja dan merupakan bagian dari kegiatan gereja. Semua tenaga pengajar yang dipakai adalah tenaga yang memang bertugas khusus untuk menangani teknis pembelajaran. Secara struktural masuk dalam pengurus Gereja. Pesertanya adalah anak-anak dari para jemaat yang berusia pelajar dan siswa. Mereka belajar satu kali dalam satu minggu di Gereja atau di rumah anggota jemaat sesuai permintaan.

Bagi umat Hindu dan Budha mensosialisasikan ajaran agamanya melalui rumah tangga dan Pura serta Vihara (Klenteng). Sosialisasi di rumah tangga dianggap utama, karena dari sini bermula pembelajaran dalam kaitannya dengan pembentukan mentalitas. Semua kegiatan kerumahtanggaan adalah pelajaran yang berharga. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur pada malam hari.

Dalam sosialisasi ajaran agama di rumah tangga, kunci dan pemegang peran utamanya adalah orang tua. Prosesi pembelajaran dilakukan dalam bentuk: pertama, Orang tua yang melakonkan melalui perbuatan nyata sebagai contoh, setiap gerak gerik orang tua adalah pelajaran bagi anak-anaknya, baik di kala makan, minum dan sebagainya; kedua, orang tua memberitahukan secara langsung kepada anak-anaknya tentang berbagai hal, Sosialisasi di Pura dan Vihara juga dilakukan secara rutin perminggu melalui ibadah mingguan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Seperti kegiatan upacara-upacara ritual yang terkait dengan peristiwa keagamaan dan persembahan kepada Tuhan.

#### 4. Perayaan Hari Besar Keagamaan

Perayaan hari besar keagamaan pada masing-masing agama merupakan kegiatan yang bersifat insidentil, karena termasuk kegiatan tahunan. Kegiatan insidentil yang dilakukan oleh umat Kristiani secara formal adalah Natal, Tahun Baru serta perayaan hari Pasca. Pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya dilokukaii di Gereja atau di tempat tertentu seperti Hotel dan Restoran. Kalau skalanya masih kecil, maka pelaksanaan kegiatan duakukan di Gereja, tetapi kalau dirayakan secara besar-besaran, maka kegiatan tersebut biasanya dilakukan di hotel-hotel, restoran atau di tempat yang lebih besar yang

umat Kristiani, Umat Islam maupun Hindu dan Budha selalu dilakukan di rumahrumah ibadah (Gereja, Masjid, Pura dan Klenteng), dan sewaktu-waktu dilakukan di rumah-rumah atau kantor berdasarkan permintaan atau jenis kegiatan. Semua umat beragama menjadikan rumah ibadah mereka sebagai sentral kegiatan keagamaan, karena setiap rumah ibadah, selain difungsikan untuk kegiatan rutin peribadatan juga difungsikan sebagai tempat pendidikan keagamaan dan kegiatan lain.

#### 2. Pendirian Rumah Ibadah

Berdirinya rumah ibadah dari masing-masing umat beragama di Manado menunjukkan adanya kebebasan hidup beragama. Antara agama yang satu dengan agama yang lain tidak saling menghalangi utnuk mendirikan rumah ibadah, sepanjang tanah yang digunakan untuk pendirian rumah ibadah tidak dalam kasus. Malah mereka saling mendukung dan saling memberi kesempatan.

Dari 279 rumah ibadah yang selama ini sudah berdiri, tidak satu di antaranya yang terdengar pernah berkasus. Artinya, tidak pernah ada pelarangan dari umat beragama tertentu kepada yang lainnya. Mereka tidak saling menghalangi, bahkan sebaliknya mereka merelakan tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah ibadah. Pada prinsipnya mereka menyetujui setiap pembangunan rumah ibadah asalkan pemilik tanah atau lokasi merelakannya, baik dalam bentuk hadiah, hibah maupun dalam bentuk jual beli. Memang beberapa kasus terjadi, pembangunan masjid dibatalkan, karena tanah untuk rencana pembangunan masjid tersebut bersengketa di antara pemiliknya. Kasus lain dari batalnya atau tidak jadinya masid dibangun, karena persoalan tidak ada kecocokan harga tanah antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Demikian halnya dari pihak pemerintah juga tidak membatasi pendirian rumah ibadah. Malah pihak pemerintah mendukung pembangunan rumah ibadah untuk melengkapi sarana peribadatan dari masing-masing umat beragama dalam rangka pelayanan terhadap umat. Hanya memang selalu menganjurkan kepada umat beragama untuk tetap memperhatikan ketentuan persyaratan pembangunan rumah ibadah guna menghindari munculnya konflik umat beragama.

# 3. Sosialisasi Agama

Salah satu bentuk transformasi keilmuan yang dilakukan oleh umat beragama Manado selain kegiatan di rumah ibadah adalah dengan menggalakkan pendidikan informal, seperti bagi penganut muslim dilakukan dalam bentuk pengajian (pendidikan non formal) baik secara khusus (takhassus) maupun secara terbuka. Umat Islam di Manado menganggap bahwa untuk

memungkinan menampung banyak orang, seperti di Stadion dan semacamnya. Kegiatan yang berskala besar dilakukan secara *Oukimene*. Pada acara *Oukimene* ini, semua wakil Gereja terlibat di dalamnya, bersama-sama, baik sebagai partisipan maupun sebagai panitia pelaksana. Ini dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan kegiatan tersebut.

Bagi umat Islam Manado melakukan juga kegiatan perayaan hari besar yang bersifat insidentil. Kegiatan insidentil yang dimaksud sudah merupakan tradisi keislaman yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya modernitas yang mengglobal. Di Manado, walaupun sudah mengarah ke kota yang menonjolkan kemodernan, namun kegiatan keagamaan yang berciri Islam sering dilakukan baik yang berskala besar maupun kecil-kecilan. Tradisi keislaman yang biasa dilakukan secara insidentil, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad saw, Isra' Mi'raj, Hijratul Rasul, MTQ dan sebagainya. Bahkan yang terkait dengan anak-anak yang belajar al-Quran melakukan kegiatan penamatan TK. Al-Quran dalam bentuk upacara/seremonial.

Kegiatan yang berskala besar, biasanya dilakukan secara formal, baik atas prakarsa pemerintah daerah, oleh Kanwil Agama atau Kandepag, maupun atas inisiatif masyarakat. Sedang kegiatan yang berskala kecil dilakukan secara bebas, ada yang formal dan ada yang tidak formal. Besar kecilnya suatu kegiatan yang insidentil tersebut tergantung dari prakarsa masing-masing, dengan memperhatikan kondisi yang ada.

Kegiatan informal yang sering dilakukan secara personel di rumah dapat dilihat ketika ada kenduri (hajatan), terutama menyangkut upacara-upacara dalam lingkaran hidup manusia, seperti kelahiran, perkawinan, naik rumah baru dan sebagainya. Kegiatan tersebut masih diakrabi oleh masyarakat, karena pendukungnya masih banyak dan hingga sekarang dapat dipertahankan, ini juga berarti secara tidak langsung terjadi kaderisasi terhadap warga lain.

Selain kegiatan rutin ibadah, umat Hindu dan Budha juga melangsungkan kegiatan atau aktivitas keagamaan yang bersifat insidentil, seperti melakukan berbagai aktivitas dalam kaitannya dengan hari Waisak, dan hari Galungan yang setiap tahun mereka rayakan. Perayaan tersebut dilaksanakan di Pura dalam bentuk sederhana. Begitujuga bagi umat Budha khususnya komunitas Tionghoa melakukan berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan tahun baru mereka, dan hari-hari yang bersejarah dalam kaitannya dengan agama mereka.

Jadi, sudah menjadi tradisi bagi umat beragama di Manado yang menanamkan rasa saling menghargai dan memberi kesempatan bagi para pemeluk agama untuk melakukan aktivitas keagamaannya masing-masing. Dengan demikian bagi penganut agama merasa bebas menjalankan aktivitas peribadatannya, tanpa merasa terganggu dari umat yang lain.

# B. Konflik dan Interaksi Sosial Umat Beragama

#### 1. Riak-Riak Konflik Umat Beragama

Umat beragama di Manado, tampak kelihatan adem-adem saja, artinya tidak ada konflik secara terbuka dan besar-besaran, sebagaimana yang terjadi di daerah lain di Indonesia, seperti Ambon dan Poso. Padahal, benih konflik di Manado sama dengan yang ada di daerah lain. Dari sisi keragaman penduduk, Manado juga sangat heterogen, hampir semua suku bangsa di Indonesia ada di daerah ini. Begitu pula keragaman dalam beragama juga terdapat di Manado, walaupun tampak yang lebih mayoritas adalah umat Kristiani.

Memang harus diakui, bahwa dalam suatu kehidupan masyarakat akan selalu muncul konflik, walaupun skala yang kecil. Banyak faktor yang menjadi pemicunya, salah satu di antaranya adalah menyangkut kesalahfahaman (misunderstanding) tentang berbagai hal dalam kehidupan. Dari sini, akhirnya melebar ke tingkat persengketaan dan boleh jadi meningkat menjadi perang terbuka.

Pada umat beragama di Manado, konflik di antara mereka juga muncul, misalnya perkelahian antar pemuda di wilayah Banjer. Awalnya dipicu oleh kesalahpahaman di antara teman mereka sendiri pada suatu acara pesta. Menurut keterangan Poluan (52 th) bahwa:

"Di kampung Banjer pemah terjadi kericuhan Salah seorang di antara mereka yang berinisial Jhoni (samaran) yang dalam keadaan mabuk mendatangi kerumunan sekelompok anak muda (di antaranya terdapat juga teman-temannya sendiri), kemudian mengeluarkan kata-kata/kalimat yang tidak senonoh, tidak enak didengar di telinga. Salah seorang pemuda yang sementara berkerumun tadi, tidak bertanya lagi, tetapi langsung mendorong dan memukul, sehingga Jhoni pun sempoyongan. Dalam keadaan begitu, teman-teman Jhoni juga tidak menerima baik perlakuan yang diterima Jhoni seperti itu. Akhirnya, mulailah perkelahian di antara mereka dan sempat mengganggu acara pesta, karena para tamu berhamburan dan panik melihat situasi yang tidak mengenakkan itu."

Konflik seperti itu merupakan hal biasa bagi anak-anak muda di Manado, karena tidak hanya terjadi di Banjer, tetapi juga di daerah atau wilayah lain di Manado, seperti daerah sekitar pasar, Tuminting, Sario dan sebagainya. Kejadian-kejadian tersebut kebanyakan dipicu dari minuman keras yang membuat orang mabuk dan berbuntut pada ketidakseimbangan dalam berbicara dan bertindak.

Untungnya setiap terjadi riak-riak konflik, belum pernah muncul ke permukaan yang lebih besar, seperti tawuran antar kampung yang melibatkan banyak orang. Semuanya bisa diatasi dengan keterlibatan para pemuka masyarakat setempat.

Riak- riak konflik antar umat beragama yang bersentuhan langsung dengan institusi adalah penggugatan dari pihak pengurus Yayasan Sekolah Frater Katolik terhadap pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara menyangkut pengklaiman tanah di samping Masjid Raya Manado. Tanah yang diperselisihkan sekarang diakui oleh pengurus yayasan Sekolah Frater sebagai miliknya, dan tidak bisa digunakan oleh yang lain. Protes tersebut ditanggapi secara dingin oleh MUI dan Pengurus Masjid Raya dan mempersilahkan pihak Pertanahan untuk melakukan pengukuran. Ternyata setelah pihak Pertanahan melakukan pengukuran, ditemukan adanya kesalahan prasangka dari pihak yayasan Katolik. Tanah yang digugat tersebut memang termasuk dalam hak milik pengurus Masjid Raya Manado.

Kemudian oleh pengurus MUI Sulawesi Utara dan pengurus Masjid Raya Manado mengadakan perundingan dengan Pengurus Yayasan Katolik. Dalam perundingan itu, pihak MUI dan pengurus Masjid Raya menanggapi protes tersebut dengan memberikan klarifikasi tentang seluk beluk sejarah tanah yang diperselisihkan. Pihak Pengurus Yayasan Katolik dengan lapang dada menerima penjelasan tersebut dan menyatakan penyesalan atas kekeliruan tersebut. Bahkan sementara ini, dalam proses penyelesaian surat pernyataan tidak keberatan dari yayasan untuk pembangunan kantot MUI tersebut.

Kasus lain yang dianggap riak-riak kecil konflik adalah menyangkut gugatan terhadap penerimaan pegawai Departemen Agama yang berbuntut pada usulan penggantian Kepala Kanwil Depag Sulawesi Utara. Kasus ini muncul diawali oleh adanya peluang di Kanwil Depag Sulawesi Utara melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2004. Di antara 357 CPNS yang akan diterima, 43 orang di antaranya jatah Guru Nasrani. Inilah yang kemudian membuat Forum Bersama Guru-Guru Kristen (Forbes G2K) di bawah pimpinan Pdt. Lucky Rumopa, S.Th. dan Pdt Billy Johanis S.Th. merasa prihatin dan menganggap umat Kristiani diperlakukan diskriminatif dalam penerimaan pc<sub>\*</sub>awai di Departemen Agama. Keprihatinan tersebut secara demonstratif disampaikan ke DPRD Sulawesi Utara dan meminta kepada wakil rakyat *mempressure* Kakanwil Depag Sulawesi Utara soal komposisi guru agama yang hendak direkrut.

Kekisruhan itu, hampir saja melebar ke konflik yang lebih besar, karena di pihak umat Islam juga berusaha untuk membela diri. Misalnya saja pernyataan

dari salah seorang pemuka Islam dan mantan anggota DPRD Sulawesi Utara, Abdurrahman Tambipi, bahwa "persoalan itu sebaiknya dicermati secara jeli. Kebijakan menyangkut porsi rekrutmen guru agama di Sulawesi Utara sudah tepat. Sebab dilihat dari sumber anggaran pendanaan Depag hanya berasal dari sekolah madrasah; pernikahan Agama Islam, dana haji dan lainnya. Sementara untuk sekolah Kristen lebih banyak berupa "yayasan" sehingga tidak masuk ke kas negara."

Untungnya dari pihak Forbes G2K melalui kordinatornya Pdt. Lucky Rumopa, S.Th. sedini mungkin menyampaikan pemyataan, bahwa "Kontroversi penerimaan CPNS guru agama di Departemen Agama Sulawesi Utara bukan persoalan tetapi menyangkut "ketidakadilan. Oleh sabab agama, kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menggiring persoalan ini menjadi sentimen agama." Bahkan, ia mempertegas, bahwa "Kami tidak pernah menganggap ini sebagai persoalan agama, dan kami tidak dibenturkan dengan sentimen agama. Aspirasi yang kami sampaikan murni untuk mengkritisi ketidakadilan." Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan agar persoalan ini tidak melebar adalah dengan jalan mengundang para tokoh agama yang tergabung dalam BKSAUA dalam rangka konsolidasi. Pada acara tersebut kordinator Forbes G2K memberikan klarifikasi seputar apa yang diperjuangkannya ke DPRD Sulawesi Utara.

Dari beberapa peristiwa tersebut di atas, semuanya dikategorikan sebagai riak-riak kecil yang sesungguhnya bisa menimbulkan konflik terbuka dan melebar di kalangan antar umat beragama. Akan tetapi, berkat kesungguhan dan keseriusan dari pemerintah dan para elit agama, khususnya yang tergabung dalam BKSAUA untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul, maka riakriak tersebut bisa diredam.

Faktor lain yang cukup menentukan, yaitu adanya kesediaan dari umat beragama menahan diri tidak berbuat sejauh mungkin yang bisa memancing kemarahan dari umat beragama lainnya. Begitupula adanya kesediaan membuka diri untuk berdialog dan mendialogkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dengan begitu terbuka peluang pengatasan masalah bisa dicapai, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

# 2. Interaksi Sosial Umat Beragama

# a. Interaksi Internal Umat Beragama

Rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura dan Vihara bukan hanya dicipta untuk kegiatan peribadatan/kebaktian, melainkan menjadi central kegiatan-

kegiatan sosial. Dari sini dipancarkan ide-ide tentang bentuk kegiatan yang akan dilakukan menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan, apakah dalam bentuk bakti sosial ataukah seremonial. Tentu semua kegiatan itu, harus dalam koridor misi keagamaan dan kemanusiaan. Dari rumah ibadah masing-masing penganut agama terjalin interaksi secara internal, sebagai media perekat membangun kebersamaan yang kemudian dipancarkan melalui program pembinaan dan pelayanan umat.

Tradisi Gereja Kristiani misalnya, beberapa gereja telah melakukan kegiatan bakti sosial, yaitu pemberian kesempatan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk disekolah- kanhinggamencapaigelartertentu, atau memperoleh pekerjaan. Tentu anak-anak tidak mampu itu di bawah perlindungan orang tua asuh atau di bawah tanggungan pengurus gereja atau elit agama. Kegiatan seperti ini yang di dalam ajaran Kristiani sangat diperlukan, karena termasuk mengaplikasikan ajaran "cinta kasih" kepada sesama.

Sebagaimana halnya dengan rumah ibadah pada agama lain, interaksi sosial secara internal dan bahkan ekstemal terbangun dari situ, kemudian aplikasinya dipancarkan dalam kehidupan sosial. Gagasan-gagasan atau ide dasamya biasa dilakukan di rumah ibadah kemudian ditindaklanjuti di luar. Hal ini diakui oleh semua elit agama di Manado, bahwa gagasan atau ide menyangkut pembinaan dan pelayanan umat beberapa di antaranya lahir dari rumah ibadah.

### b. Interaksi Sosial Antar Umat Beragama

Fakta sosial menunjukkan, bahwa di Manado terdapat penganut agama yang heterogen. Tetapi dari keragaman tersebut bisa terwujud suatu kehidupan yang damai, tentram, tanpa menimbulkan kegaduhan dalam hidup bermasyarakat. Mereka bisa hidup berdampingan dengan prinsip masing-masing dan tidak saling mengganggu, mereka saling menghargai keyakinan yang dianut. Bagi mereka, yang perlu dikembangkan dan dipelihara adalah hidup secara rukun. Oleh karena itu, slogan "TORANG SAMUA BASUDARA" bukan hanya sebatas simbol persaudaraan dan kedamaian, melainkan adalah "Nilai" tertinggi yang harus dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Selama ini belum pemah terjadi konflik umat beragama yang disebabkan oleh prilaku keagamaan dari masing-masing penganut agama, apakah itu dalam intern umat beragama, antar umat beragama ataukah umat beragama dengan pemerintah. Dilihat dari aspek kesejarahan, umat Kristiani yang lebih duluan dan menguasai Manado, kemudian tumbuh secara pesat. Setelah itu muncul umat Islam yang konon diterima baik kehadirannya oleh umat Kristiani saat itu. Hadirnya umat Islam di tengah umat Kristiani bukan sesuatu yang merisaukan,

melainkan manjadi sesuatu yang menggembirakan, karena keduanya menjadi mitra dalam membina masyarakat.

Interaksi Sosial yang dibangun sesungguhnya mengarah pada tindakan positif, karena apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan upaya implementasi dari ajaran agamanya. Hingga sekarang interaksi sosial yang dibangun dapat ditemukan pada aspek tolong-menolong sesama warga, tanpa memandang latar belakang suku dan agama. Misalnya, seorang muslim mengadakan pesta perkawinan, tetangga yang non muslim ikut membantu dalam mempersiapkan pesta tersebut, ada yang terlibat dalam perencaanaan, pengedaran undangan, penyiapan perlengkapan pesta dan sebagainya. Hal lain dapat juga dilihat pada keakraban bertetangga, antara satu sama lain saling kunjung mengunjungi di saat luang, mengalami kegembiraan bahkan pada saat susah atau mengalami musibah.

Di bidang ekonomi, interaksi juga terbangun dalam koridor ekonomi, misalnya pada masyarakat Manado, kebanyakan bergerak pada sektor perdagangan, baik perdagangan hasil bumi maupun kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pada sektorsektor tersebut tidak ada lagi pembatas antara masyarakat pribumi dan non pribumi, atau antara pendatang dengan penduduk asli atau antara perdagangan yang digeluti oleh umat Kristiani dengan Umat lain. Masyarakat Manado sudah membaur di dalamnya, berinteraksi satu sama lain melakukan kegiatan yang terkait dengan bidang ekonomi, misalnya dalam hal transaksi perdagangan, jual beli, dan lain-lain.

Dari sisi politik praktis, masyarakat Manado menjadikan agama sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya. Demikian sebaliknya para praktisi politik kebanyakan mengambil pertimbangan seperti itu, bahkan menjadikan agama sebagai komoditas politik. Pada Pilkada bulan Juni 2005 di Manado, dua calon Walikota dari kalangan Umat Kristen menggandeng calon Wakil Walikota dari kalangan umat Islam. Demikian halnya dua calon Gubernur dari umat Kristen menggandeng calon wakil Gubernur dari kalangan umat Islam.

Dari kasus tersebut adalah suatu pertanda bahwa masyarakat Manado menjadikan agama sebagai pertimbangan politik praktis. Ini memang harus diperhitungkan, karena para partisipan politik, dalam hal ini para pemilih pada Pilkada adalah umat beragama. Tentu, sentimen emosi keagamaan merupakan pilihan yang tidak dapat diabaikan, karena di dalamnya terdapat aset politik yang diperebutkan. Kondisi seperti itu, secara otomatis terbangun interaksi antar umat beragama dalam koridor politik.

#### C. Upaya Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

#### 1. Peran Pemerintah

#### a. Instansi Departemen Agama

Secara proporsional yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan kerukunan umat beragama di tingkat daerah, khususnya kota Manado adalah pihak Departemen Agama, dalam hal ini Kandepag Kota Manado. Namun demikian, pihak Kanwil Departemen Agama Sulawesi Utara justru selalu terlibat secara langsung. Keterlibatan pihak Kanwil Departemen Agama Sulawesi Utara ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di ibu kota provinsi. Tugas tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan.

Kegiatan yang menonjol yang terkait dengan upaya pemeliharaan pembinaan kerukunan umat beragama yang dilakukan selama ini, adalah melalui "Pembinaan Kelembagaan." Departemen Agama di Sulawesi Utara dan Kota Manado merupakan ujung tombak pemerintah dalam program pembangunan di bidang agama. Salah satu program utama yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap umat beragama melalui lembaga-lembaga keagamaan. Apakah yang terkait langsung dengan umat di rumah-rumah ibadah (Lembaga Kependetaan, Pastorat, dan Ulama) atau yang secara spesifik menangani lembaga kependidikan.

Pembinaan kelembagaan ini penekanannya menyangkut fungsionalisasi Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Badan Kerjasama Wanita Antar Umat Beragama (BKWAUA) yang telah didirikan oleh pemerintah bersama para pemuka agama dari masing-masing agama. Bentuk pembinaannya dilakukan melalui pemantauan kegiatan pertemuan setiap bulan, menggalakkan pertemuan insidentil di antara para pengurus.

## b. Peran Pemerintah Daerah dan Jajarannya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cukup intens terhadap pemeliharaan pembinaan kehidupan umat beragama. Perhatian tersebut mulai serius pada tahun 1968, ketika itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh H.V. Worang yang sekaligus sebagai tokoh pemrakarsa. Pemerintah menganjurkan kepada pra pemuka/tokoh agama di Sulawesi Utara untuk melakukkan pertemuan/dialog antar pemuka agama. Pertemuan tersebut awalnya dimaksudkan untuk membicarakan keikutsertaan umat beragama dalam pembangunan, khususnya di Sulawesi Utara.

Atas prakarsa pemerintah itu diadakan pertemuan antara para pemuka agama yang dihadiri oleh wakil-wakil umat beragama dari masing-masing agama. Salah satu hasil cemerlang pada saat itu ialah "Pembentukan Baclan Kerja Sama Antar Umat Beragama"sLtzai disingkat dengan BKSAUA. Hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Utara, dan berdasarkan hasil pertemuan antar pemuka agama, Gubemur Kepala Daerah Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 91/KT. 15/ 1969 Tanggal 25 Juli 1969 tentang Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulawesi Utara. Terbentuknya wadah BKSAUA di tingkat provinsi menunjukkan betapa tinggi perhatian pemerintah terhadap pembinaan kehidupan keagamaan, khususnya dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Komponen kepengurusan BKSAUA yang sudah terbentuk hingga sekarang diambil dari semua unsur umat beragama. Kepengurusan forum BKSAUA tersebut hanya berbentuk presidium yang secara bergantian atau bergilirmenjadi koordinator Sedang anggota yang duduk dalam kepengurusan diambil dari wakil masing-masing umat beragama. Hingga kini BKSAUA, bukan hanya ada di tingkat provinsi, tetapi sudah sampai ke tingkat kabupaten / kota dan kecamatan.

Wadah lain yang diprakarsai pembentukannya oleh pemerintah adalah Badan Ketahanan Wanita Antar Umat Beragama atau disingkat dengan BKWAUA. Wadah ini dibentuk pada tanggal 1 Nopember 1999. Tujuan pembentukan BKWAUA adalah untuk menggalang kerukunan wanita antar umat beragama di Sulawesi Utara dan mewujudkannya dalam kegiatan nyata dan bermakna yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan kualitas wanita dari semua unsur agama, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa.

Selain membentuk wadah dan meningkatkan efektifitas forum atau wadah melalui pertemuan dan musyawarah antar umat beragama, pihak pemerintah daerah juga menyebarluaskan informasi mengenai perundangundangan dan kebijakan pemerintah menyangkut pembinaan kerukunan hidup beragama, baik melalui media cetak, brosur dan spanduk maupun ceramah agar dapat dijadikan pedoman bagi umat beragama.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah yang disebarluaskan melalui brosur dan slogan di jalan adalah "TORANG SAMUA BASUDARA". Slogan ini terpajang di spanduk dan papan (tempat) reklame yang berukuran besar, dipasang di jalan-jalan utama. Slogan tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari program pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran sebagai suatu bangsa yang wajib hidup bersama-sama secara damai dan bersatu di bumi Indonesia. Slogan tersebut merupakan slogan umum dari program pembinaan kerukuran beragama di Sulawesi Utara. Kemudian implementasi dari situ dilakukan pencanangan prioritas secara bertahap. Pada tahun 2002 penekanannya adalah tahun "Kasih," tahun 2003 disebut tahun "Kasih, tanpa Pertikaian"; tahun 2004, disebut tahun "Kasih dan Pengharapan"; tahun 2005 disebut tahun "Kasih dan Rahmat."

Semua kegiatan dari program pembinaan kerukunan hidup umat beragama tersebut sudah menjadi kegiatan rutin. Pemerintah daerah secara serius menanganinya dengan mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara untuk memasukkan segala resiko pembiayaannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun. Jadi, ini suatu indikator bahwa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap pembinaan kerukunan hidup umat beragama; dan mengajak jajarannya yang lain sperti dari kalangan legislatif untuk berpartisipasi di dalamnya. Ajakan serupa juga dilakukan terhadap pihak aparat kepolisian dan instansi lainnya.

## 2. Peran Masyarakat

Kepedulian pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan wadah BKSAUA mendapat respon yang baik dari kalangan pemuka agama bahkan umat beragama secara keseluruhan. Oleh karena itu, gelindingan bola dari pemerintah ditangkap baik para pemuka agama, sehingga tampak terjadi gayun bersambut antara pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat, maka muncullah kesepakatan untuk melakukan pembentukan BKSAUA di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Disusul kemudian pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Begitupula dengan pembentukan BKSWAUA

Komponen lain dari warga yang punya kepedulian terhadap persoalan kerukunan adalah para pemuda. Mereka juga tidak mau ketinggalan dengan membentuk satu wadah perhimpunan pemuda umat beragama pada tingkat Provinsi yang disebut "Jaringan Kerja Kasih" (JAJAK). Kelompok yang tergabung di dalam JAJAK adalah dari para pimpinan pemuda dari berbagai agama, kelompok independen, seperti Media Massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta dari pihak pemerintah. Wadah ini rupanya menghimpun berbagai komponen kemsyarakatan.

Program riil yang telah dilakukan adalah menggalakkan dialog-dialog pemuda umat beragama, baik dalam bentuk konsultatif maupun dalam bentuk seminar dan workshop. Salah satu hasil nyata dari program JAJAK yang sudah terealisir dan monumental adalah berdirinya satu tempat yang bersifat simbolik dari wujud kerukunan di wilayah Minahasa dengan didirikannya rumah ibadah masing-masing agama. Tempat itu disebut "BUKIT KASItT dengan suatu kandungan makna filosofis bahwa "semua umat beragama hidup dalam kasih. Perbedaan yang ada bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sepakat untuk saling memahami, saling menghargai dan berpegang pada semboyan "TORANG SAMUA BASUDARA".

Secara fungsional setiap wadah kerukunan tersebut selalu melakukan kegiatan bulanan, yaitu rapat kordinasi di kalangan para pengurus. Persoalan yang diperbincangkan meliputi:

Pembahasan kasus-kasus konflik (riak-riak penyebab konflik); Salah satu bahan materi yang dibicarakan pada setiap pertemuan bulanan adalah menyangkut kasus-kasus konflik. Artinya, setiap peserta dari para pengurus diberi peluang untuk menginformasikan tentang berbagai hal yang ditemukan di lapangan, khususnya menyangkut peristiwa konflik. Jadi kegiatan ini merupakan inpentarisasi masalah tentang konflik di masyarakat.

Antisipasi munculnya ketegangan antar umat beragama; Dari masalah konflik yang sudah diinventarisir, dilakukan analisis secara mendalam terhadap setiap masalah tersebut; kemudian lahir rumusan tentang cara mengantisipasinya. Ini dilakukan dalam rangka meredam terjadinya konflik yang lebih besar.

Sosialisasi kerukunan pembahasan materi konflik tersebut tidak berhenti, tetapi dilakukan upaya sosialisasi. Biasanya para pengurus menentukan dulu penanggungjawabnya, kemudian kegiatan sosialisasinya dilakukan secara bersama. Selain kegiatan rutin perbulan, lembaga yang ada seperti BKSAUA, BKSWAUA, dan JAJAK juga melakukan kegiatan tahunan. Agenda pembicaraannya menyangkut 3 hal yaitu: Pertama, organisasi/lembaga itu sendiri; menyangkut pembicaraan di sekitar organisasi. Begitupula menyangkut personalia kepengurusan. Kedua, masalah umum; pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat umum, materi yang diangkat berkisar pada evaluasi terhadap kondisi kerukunan secara riil yang ada di masyarakat. Ketiga, rekomendasi; menyangkut program dan hal-hal yang urgen dalam kehidupan masyarakat, khususnya pemantapan kerukunan umat beragama.

# D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

#### 1. Faktor Pendukung

Berangkat dari kenyataan, bahwa kondisi kehidupan sosial keagamaan masyarakat Manado menunjukkan suatu kehidupan yang positif, artinyapemeluk agama bisa hidup tenteram, bebas menjalankan ajaran agamanya sesuai keyakinan masing-masing, tanpa merasa terganggu dari penganut agama yang lain. Hubungan antar penganut agama tampak terjalin secara harmonis, ini terlihat dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam lingkup yang lebih kecil (hubungan ketetanggaan) maupun yang lebih besar (hubungan kemasyarakatan). Terjadinya kehidupan yang harmonis seperti itu bisa dicapai, karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

# a. Kesungguhan hati pemerintah;

Pemeliharaan Stabilitas: pemerintah memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pembinaan kehidupan umat beragama dalam rangka memelihara stabilitas. Cuplikan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat Pemda Sulawesi Utara berinisial J Lengkong (50 th) menyebutkan bahwa: "pada agama terdapat potensi yang besar, karena semua agama membawa pesanpesan kebaikan. Para penganut agama yang memang memahami dan meresapi ajaran agamanya, tentu tidak tertarik untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Agama bisa memotivasi umat untuk menahan diri dan tidak melakukan keonaran. Nah! melalui sentuhan agama, masyarakat bisa damai, hidup tenang."

Jadi, pemerintah cenderung menjadikan agama sebagai perekat, pemersatu untuk kepentingan stabilitas dan kedamaian.

Dukungan pembiayaan kegiatan: Dari sisi pertimbangan pemeliharaan stabilitas, maka pemerintah Sulawesi Utara antusias melakukan pembinaan kehidupan umat beragama melalui wadah atau lembaga kerja sama antar umat beragama pada semua level. Khusus pemerintah Sulawesi Utara telah mengalokasikan anggaran pembinaan kerukunan umat beragama dengan memasukkan pembiayaannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan salah satu bentuk dukungan secara materil terhadap pembinaan kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara.

## b. Efektifnya Wadah perhimpunan (Institusi)

Wadah atau institusi perhimpunan antar umat beragama, baik pada tingkat pemuka agama seperti "Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA), dan Badan Kerja Sama Wanita Antar Umat Beragama BKSWAUA, maupun Jaringan Kerja Kasih (JAJAK) pada tataran kepemudaan merupakan perpanjangan tangan para penganut agama yang di dalamnya terdapat wakil dari masing-masing penganut agama. Institusi ini berfungsi sebagai wadah untuk memasak berbagai persoalan keagamaan. Setiap bulan tokoh agama yang tergabung di dalamnya melakukan pertemuan rutin membahas persoalan yang sedang dialami dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul. Jadi institusi tersebut betul-betul bekerja dan fungsional, bukan hanya sekedar simbol sebagaimana instituasi serupa yang terdapat di daerah lain.

#### c. Peran Tokoh-tokoh Agama

Para tokoh agama dari masing-masing umat beragama, baik yang duduk sebagai pengurus pada "institusi" di atas maupun yang tidak duduk dalam kepengurusan memiliki komitmen yang jelas tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Komitmen itu ditunjujukkan di dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat. Mereka selalu mengundangkan khutbah-khutbah yang segar dan menyejukkan, tanpa menyebar fitnah dan memperbesar persoalan yang kecil. Mereka selalu berupaya menghindari provokasi yang bisa menimbulkan ketidak- tenteraman dalam masyarakat. Setiap terjadi riak-riak kecil di lingkungannya, mereka secara langsung meredamnya, sehingga tidak terjadi insiden yang lebih besar.

#### d. Solidaritas keumatan

Kampanye persaudaraan yang disebar ke berbagai penjuru kota melalui pemasangan papan iklan dan spanduk yang bertuliskan "Torang Samua Basudara" merupakan slogan yang ampuh menyentuh dan membangun emosi persaudaraan umat beragama. Slogan melalui iklan dan spanduk tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama tokoh agama dalam rangka menanam solidairtas keumatan. Implementasi dari situ bisa dilihat pada acara-acara cerimonial keagamaan yang dilakukan oleh para penganut agama. Jadi melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan yang dilakukan secara bersama oleh umat beragama, fanatisme berlebihan terhadap ajaran agama bisa diredam. Mereka mengakui, bahwa Setiap penganut agama dituntut

untuk menataati ajaran agama yang dianutnya, tetapi tidak berarti harus menumbuhkan fanatisme yang berlebihan.

#### e. Kultural

Orang Manado (etnik Minahasa) dan Sulawesi Utara pada umumnya sejak dahulu kala sudah menjalin hubungan dengan dunia luar melalui usaha perdagangan. Mereka bisa menerima kehadiran para pedagang dari berbagai daerah dan etnik, baik dari nusantara maupun dari mancanegara. Bahkan lebih dari itu, mereka menjalin komunikasi dan membangun kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa melihat latar belakang etnik dan agama yang dianut. Perlakuan serupa hinga kini juga masih mewarnai kehidupannya. Jadi, keterbukaan dan kesediaan menerima orang lain yang berbeda latar belakang agama dan etnik memang sudah terbangun secara kultural.

#### 2. Faktor Penghambat

#### a. Provokasi pihak ketiga;

Kehidupan rukun yang dibangun masyarakat Manado selama bertahuntahun, bisa saja hancur seketika, apabila ada orang yang melakukan adu domba atau penghasutan (provokasi) di dalamnya. Kemungkinan penghasutan itu terjadi dari adanya pihak ketiga yang ingin menarik manfaat untuk kepentingan tertentu. Banyak hal yang bisa jadi topik penghasutan, misalnya memperbesar perbedaan, menyentuh ajaran dasar dan sebagainya. Upaya antisipasi terhadap provokasi, para tokoh agama sudah menyiapkan penangkalnya dengan melakukan pertemuan bulanan secara rutin, membahas berbagai isu keagamaan yang berkembang.

# b. Perbedaan dan fanatisme keagamaan;

Secara kuantitas masyarakat Manado tampak mayoritas menganut Kristen Protestan. Akan tetapi, di daerah ini sudah terjadi heterogenitas keberagamaan. Otomatis kemajemukan dan perbedaan-perbedaan tidak terhindarkan; dan tentu para penganut dari masing-masing agama akan menjalankan ajaran agamanya sesuai keyakinannya.

Perbedaan-perbedaan yang ada bukan hanya terjadi pada agama-agama besar, tetapi secara internal pada masing-masing agama juga terdapat perbedaan. Ini tergambar dari banyaknya aliran-aliran atau gereja-gereja yang berbeda ajaran dan faham kegamaannya. Belum lagi beranjak ke para penganut agama yang memiliki kadar emosi keagamaan yang berbeda-beda, sehingga pada tataran

perhatian dan pelaksanaan ajaran agama juga menampakkan perbedaan. Hal itu merupakan suatu hal yang wajar, namun dari situ akan diikuti oleh fanatisme keagamaan. Kefanatikan terhadap ajaran agama boleh jadi semakin ekstrim ketika terusik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Memang tampak tidak rasional, karena yang muncul ke permukaan adalah keimanannya sebagai wujud dari pemahamann ajaran agama yang diyakini serta pencermatannya terhadap *impuls-impuls* yang mengitarinya. Pada aspek ini, termasuk wilayah kritis, karena orang lain bisa memanfaatkan ke arah yang negatif, dalam arti digunakan untuk merusak tatanan kerukunan.

## c. Kebijakan yang tidak menggambarkan keadilan (perimbangan)

Suatu pelajaran yang sangat berharga ketika terjadi demonstrasi dari umat Nasrani yang menggugat pemerintah (Kakanwil Departemen Agama Sulawesi Utara) menyangkut kebijakan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka menuntut agar pihak Departemen Agama berlaku adil kepada umat Kristen sebagai mayoritas. Walaupun demonstrasi itu berlangsung beberapa hari dan memicu ketegangan selama kurang lebih 3 bulan, namun tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Peristiwa tersebut hampir saja meledak menjadi konflik terbuka, akan tetapi pihak pemerintah, DPRD dan BKSAUA dengan cepat mengantisipasinya. Ini suatu pertanda bahwa suatu kebijakan yang tidak menggambarkan keadilan, bisa menjadi penghambat terciptanya kerukunan umat beragama.

#### V. PENUTUP

# A. Kesimpulan

Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya sudah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah dan para pemuka agama telah sepakat dan berkomitmen untuk memelihara kedamaian dalam suatu kehidupan yang rukun di kalangan umat beragama. Komitmen tersebut dimanifestasikan dalam bentuk:

1. Umat beragama secara leluasa melakukan aktivitas keagamaan, baik dalam kaitannya dengan peribadatan, sosisalisasi ajaran agama (pendidikan) maupun pendirian rumah ibadah. Masing-masing umat beragama memberi kesempatan dan tidak saling menghalangi, bahkan cenderung saling membantu dan melibatkan diri, terutama pada upacara-upcara keagamaan. Ini suatu pertanda adanya kesadaran kolektif tentang pluralitas bangsa dan tuntutan untuk mempertahankan kedamaian dan integritas masyarakat.

- 2. Dalam kehiduapan sosial secara umum memang tanpa terjalin interaksi sosial yang mesra dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kedamaian dengan mengedepankan simbol "Torang Samua Basudara". Akan tetapi pada aspek politik pemerintahan Interaksi sosial yang dibangun dan dikembangkan oleh umat beragama di Manado cenderung bersifat serba hati-hati. Masih tetap ada skenario untuk menguasai dan mendominasi segmen kehidupan pemerintahan dalam arti sulit untuk memberi kesempatan kepada penganut agama lainnya, walaupun pada pilkada Juni 2005 yang lalu, masih menjadikan pertimbangan agama sebagai pilihan politik.
- 3. Walaupun tampak terkesan, bahwa intervensi pemerintah (top down) terlalu tinggi untuk pemeliharaan kerukunan, namun hasilnya tidak mengecewakan. Keseriusan pemerintah membuat program kedamaian dengan dukungan fasilitas untuk fungsionalisasi lembaga kerukunan (BKSAUA) dan semacamnya; pencanangan "tahun kasih" selama 4 tahun terakhir; juga sosialisasi kerukunan melalui papan reklame dan spanduk yang bertuliskan "TORANG SAMUA BASUDARA" yang dipasang di sudut-sudut jalan, bukan hal yang sia-sia, karena hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh umat beragama.
- 4. Intervensi pemerintah dalam upaya penciptaan kerukunan mendapat respons positif dari masyarakat. Keterlibatan mereka dalam program-program BKSAUA, BKWAUA dari provinsi hingga ke kecamatan-kecamatan merupakan gambaran wujud peran serta masyarakat, walaupun terkesan program tersebut masih berada di tataran elit, tidak berarti gaungnya tidak menyentuh ke akar rumput. Bahkan dari sana terpancar suara kedamaian. Intinya adalah menggiring masyarakat ke suatu kondisi saling terbuka dan saling menerima perbedaan dan kemajemukan yang ada menuju kehidupan yang rukun.

## B. Rekomendasi

Kehidupan yang rukun bisa tercipta manakala: pertama, semua komponen masyarakat dan pemerintah memilki komitmen yang kuat menciptakan kerukunan; kedua, adanya pengkondisian kedamaian melalui upaya-upaya riil yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup masyarakat; ketiga, fungsionalnya lembaga-lembaga (institution) kerja sama antar umat beragama dalam mengantisipasi setiap gejolak sebagai pemicu konflik; keempat, sosialisasi perundang-undangan

#### DAFTAR PUSTAKA

- AH, Mursyid, "Konflik Sosial Bernuansa Agama (Studi Kasus tentang Tragedi Kerusuhan Poso) di dalam Muhaimin AG. (ed) "Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia" (Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama), 2003
- Azra, Asyumardi, *Sistem Siaga Dini untuk Kerusuhan* (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan- PPEVI JArN Jakarta), 1999
- Coser, Lewis A., The Function of Social Conflict yang dikutip oleh M. Atho Mudzhar "Pluralisme, Pandangan Ideolis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" di dalam Moh. Soleh Isre (ed) "Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer" (Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama), 2003
- Johnson, Dyoyle Paul, 'Teori Sosiologi Klasik dan Moderen" (Jakarta: Gramedia Pustaka), 1990
- M. Atho Mudzhar, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam rangka Keharmonisan Hubungan Asntar Umat Beragama" di dalam Muhaimin AG (ed)''Damai di Dunia Damai Untuk Semua, Perspektif Berbagai Agama (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan), 2003
- Poewadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: BaLai Pustaka), 1976
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI), 1974